



BAHASA SINDIRAN DI TWITTER (X): STUDI PRAGMATIK TERHADAP TWEET POLITIK POPULER

¹Fadilah Neyarasmi, ²Nur Hasbi

^{1,2}Universitas Negeri Makassar

Corresponding author: nur.hasbi@unm.ac.id

Info Artikel

Submit: 07

Desember 2024

Accepted: 23

Desember 2024

Publish: 27

Januari 2025

Keywords:
pragmatik,
bahasa sindiran,
Twitter (X),
wacana politik,
media sosial

© 2025
Education and
Talent
Development
Center of Indonesia
(ETDC Indonesia)
Under the license
CC BY-SA 4.0



Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena bahasa sindiran dalam tweet politik populer di Twitter (X) sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi sosial-politik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode analisis isi, data berupa 30 tweet yang mengandung unsur sindiran dikumpulkan secara purposif, kemudian dianalisis menggunakan teori implikatur Grice, prinsip kesantunan Brown dan Levinson, serta analisis tindak tutur Austin dan Searle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa sindiran digunakan netizen untuk mengungkapkan kritik sosial, resistensi politik, dan kekecewaan kolektif terhadap penguasa. Strategi bahasa yang digunakan meliputi ironi, hiperbola, humor sarkastik, metafora sinis, hingga pertanyaan retorik. Twitter (X) berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan partisipasi politik horizontal dan menyuarakan perlawanan terhadap kekuasaan secara kreatif dan implisit. Dengan demikian, bahasa sindiran dalam media sosial menjadi indikator penting dalam membaca dinamika sosial-politik masyarakat digital.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara manusia berkomunikasi. Media sosial, khususnya Twitter (X) telah menjadi ruang publik digital tempat masyarakat menyuarkan pendapat, kritik, dan ideologi politik mereka. Dalam konteks politik, Twitter (X) menjadi arena yang dinamis dan terbuka, di mana pengguna tidak hanya menyampaikan opini secara eksplisit, tetapi juga melalui gaya bahasa yang bersifat implisit seperti sindiran. Bahasa sindiran banyak digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan, tokoh politik, atau fenomena sosial-politik tanpa harus menyebutkan secara langsung subjek yang dimaksud. Hal ini menjadikan sindiran sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam menjaga posisi sosial pengguna sekaligus menyampaikan pesan dengan kekuatan retorik yang tinggi.

Dalam kajian pragmatik, bahasa sindiran termasuk bentuk ujaran tidak langsung yang bermakna implisit. Implikatur percakapan yang dikemukakan oleh Grice (1975) menjadi teori utama dalam memahami bagaimana penutur menyampaikan makna yang tidak tersurat namun dapat dipahami oleh pendengar dalam konteks tertentu. Ketika seseorang menyindir, ia sering kali melanggar satu atau lebih maksim dalam prinsip kerja sama, seperti maksim kualitas atau relevansi, untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dari sekadar makna literal. Selain itu, strategi kesantunan yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1987) juga relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana penutur menyusun ujaran yang menyindir secara halus demi menjaga muka (face) lawan tutur maupun dirinya sendiri. Dalam komunikasi media sosial yang bersifat terbuka dan rentan konflik, strategi kesantunan negatif sering digunakan agar kritik tetap tersampaikan namun tidak secara frontal.

Fenomena penggunaan sindiran di media sosial juga erat kaitannya dengan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi komunikasi digital. Di Indonesia, sindiran telah menjadi bagian dari budaya komunikasi sehari-hari yang kental dengan nuansa tidak langsung, eufemisme, dan kehati-hatian. Bentuk sindiran seperti satire, ironi, dan sarkasme memiliki akar dalam praktik komunikasi tradisional dan diperkuat dalam budaya digital. Dengan demikian, analisis bahasa sindiran di Twitter (X) tidak hanya mencerminkan strategi linguistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-politik masyarakat yang menggunakannya. Hal ini memperkaya kajian pragmatik dengan perspektif interdisipliner yang menggabungkan bahasa, budaya, dan politik.

Twitter (X) memiliki karakteristik tersendiri yang mendukung berkembangnya sindiran, seperti batasan karakter, penggunaan tagar (#), mention (@), dan retweet yang memungkinkan penyebaran pesan secara cepat dan luas. Karakteristik ini memungkinkan pengguna menyampaikan kritik politik dengan cara yang ringkas namun tajam, sering kali melalui permainan kata, alusi, dan penggunaan simbol-simbol populer. Menurut Zappavigna (2012), media sosial seperti Twitter (X) memungkinkan pembentukan identitas sosial melalui praktik linguistik yang berorientasi pada komunitas. Dalam konteks ini, penggunaan sindiran bukan hanya bentuk ekspresi individual, melainkan juga bagian dari konstruksi identitas kolektif yang mengarah pada pembentukan opini publik.

Selain sebagai sarana ekspresi, Twitter (X) juga berperan sebagai ruang pertarungan wacana politik. Dalam situasi politik yang memanas, seperti masa kampanye atau ketika muncul skandal politik, sindiran di Twitter (X) menjadi alat retorik untuk membangun narasi alternatif terhadap narasi resmi pemerintah atau

kelompok tertentu. Pengguna Twitter (X) memanfaatkan bahasa sindiran untuk membongkar paradoks, mengkritisi janji politik, atau membentuk citra negatif tokoh tertentu secara tidak langsung. Sebagaimana dijelaskan oleh van Dijk (1998), wacana politik bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membangun kekuasaan, ideologi, dan dominasi. Dalam konteks ini, sindiran menjadi strategi simbolik yang digunakan untuk meresistensi atau bahkan merekonstruksi kekuasaan.

Studi pragmatik terhadap sindiran di media sosial juga dapat memberikan kontribusi dalam memahami etika berkomunikasi di ruang digital. Meskipun sindiran sering digunakan untuk menghindari konflik langsung, penggunaannya yang berlebihan atau tidak tepat konteks dapat menimbulkan interpretasi negatif dan memicu debat yang tidak produktif. Oleh karena itu, analisis pragmatik terhadap bahasa sindiran dapat membantu mengidentifikasi batas-batas etis dalam praktik komunikasi daring. Hal ini sejalan dengan gagasan Leech (1983) mengenai prinsip kesantunan yang bertujuan menciptakan harmoni dalam komunikasi.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya kajian pragmatik dalam media sosial. Maghfiroh dan Rahmiati (2024), dalam kajiannya terhadap komentar netizen, menunjukkan bahwa strategi kesantunan sering kali digunakan untuk menutupi kritik keras dengan bahasa halus. Pratama (2024) menyebutkan bahwa dalam ruang digital seperti Twitter (X), bahasa menjadi alat utama untuk membangun solidaritas kelompok maupun menyebarkan provokasi. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik memfokuskan pada bentuk-bentuk sindiran dalam konteks tweet politik populer, padahal tema ini sangat relevan dalam konteks demokrasi digital dan kebebasan berpendapat di ruang maya.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan relevansi sosial dari fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna sindiran dalam tweet politik populer melalui pendekatan pragmatik. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya teori pragmatik dalam konteks digital, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap literasi media, pemahaman wacana politik, dan pengembangan komunikasi yang etis dan kritis di ruang publik digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan bentuk dan makna bahasa sindiran dalam tweet politik tanpa memanipulasi variabel apa pun. Sebagaimana dinyatakan oleh Moleong (2019), penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan pandangan partisipan atau teks yang diteliti. Dalam konteks ini, data yang dianalisis berupa tweet-tweet politik yang mengandung sindiran, yang dianalisis berdasarkan teori pragmatik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah tweet politik populer yang dipublikasikan di platform Twitter (X) dalam kurun waktu Januari–April 2025. Tweet dipilih berdasarkan tingkat interaksi (seperti jumlah like, retweet, dan komentar) untuk memastikan bahwa data yang digunakan merepresentasikan opini yang mendapat perhatian publik. Selain itu, tweet yang dipilih harus mengandung unsur sindiran politik yang relevan dengan isu-isu politik nasional, seperti pemilu, kebijakan pemerintah, atau kontroversi tokoh politik. Dengan kriteria ini, peneliti memastikan bahwa data memiliki nilai pragmatik dan relevansi kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data berupa tangkapan layar (screenshot) atau salinan teks tweet yang telah memenuhi kriteria. Untuk memastikan legalitas dan keterlacakan data, setiap tweet yang dikumpulkan akan dicatat metadata-nya, seperti tanggal, nama akun (dianonimkan untuk menjaga privasi), dan jumlah interaksi. Selain itu, pencatatan konteks sosial-politik di saat tweet dipublikasikan dilakukan untuk memperkaya analisis pragmatik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring tweet-tweet yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu sindiran politik. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan bentuk sindiran berdasarkan jenisnya, misalnya ironi, satire, atau sarkasme. Selanjutnya, makna implikatur dalam setiap sindiran dianalisis berdasarkan teori Grice (1975) mengenai maksim percakapan serta teori kesantunan Brown dan Levinson (1987).

Dalam menganalisis bentuk sindiran, peneliti mengidentifikasi pola-pola linguistik yang digunakan, seperti penggunaan majas, metafora, antitesis, maupun humor. Sementara itu, analisis makna sindiran difokuskan pada bagaimana implikatur terbentuk melalui pelanggaran maksim dan bagaimana strategi kesantunan diterapkan. Untuk meningkatkan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil analisis dengan literatur terkait. Selain itu, kredibilitas diperkuat dengan melakukan analisis mendalam terhadap tiap data dan mempertimbangkan konteks luas dari isu-isu politik yang berkembang di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum memasuki rincian hasil temuan, penting untuk dipahami bahwa media sosial khususnya Twitter, merupakan ruang diskursif yang memungkinkan pengguna menyampaikan opini politik secara terbuka, spontan, dan sering kali menggunakan gaya bahasa yang ekspresif, termasuk sindiran. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sindiran sebagai strategi pragmatik digunakan dalam tweet politik populer untuk mengungkapkan kritik terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka teori maksim kerja sama Grice, prinsip kesantunan Leech, serta teori tindakan tutur dari Austin dan Searle, hasil penelitian dikelompokkan menjadi beberapa tema pokok berdasarkan isi dan sasaran sindiran.

a. Sindiran terhadap Apatisme dan Ketidakpedulian Publik

Tweet-tweet bertagar politik memperlihatkan penggunaan strategi sindiran terhadap sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap kondisi negara. Dalam tweet seperti “masyarakat sini buta politik semua... mereka lebih takut timnasnya gugur dari pada negaranya ancur,” terdapat penggunaan ironi dan hiperbola sebagai bentuk sindiran terhadap apatisme politik. Ini sejalan dengan teori implikatur Grice (1975), di mana penutur menyampaikan makna lebih dari apa yang dikatakan secara literal, untuk mengkritik ketidakpedulian publik.

Sindiran ini mengungkapkan adanya kekesalan terhadap kondisi di mana hiburan, seperti sepak bola, dianggap lebih penting daripada nasib bangsa. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran prioritas dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam konteks pragmatik, ujaran semacam ini adalah cara netizen menunjukkan resistensi terhadap ketidakpedulian sosial.

Apatisme politik ini juga digambarkan dalam tweet-tweet yang menyatakan bahwa masyarakat kabupaten cenderung tidak peduli pada isu-isu nasional. Stereotip seperti ini mengandung kritik terselubung terhadap kesenjangan informasi dan literasi politik antara daerah dan pusat. Netizen menyoroti bahwa ketidakpedulian semacam ini bisa memperburuk keadaan demokrasi.

Sindiran terhadap ketidakpedulian publik juga menjadi sarana edukasi informal di media sosial. Melalui sarkasme, netizen mengajak pengguna lain untuk lebih peka terhadap situasi politik dan sosial. Sindiran berfungsi bukan hanya sebagai bentuk kritik, tetapi juga sebagai alat kesadaran kolektif.

Sindiran terhadap masyarakat yang mengabaikan politik juga dapat dibaca sebagai ekspresi frustrasi karena kurangnya keterlibatan publik dalam demokrasi. Kritik semacam ini mencerminkan kegelisahan terhadap lemahnya fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah.

b. Sindiran terhadap Pemerintah dan Birokrasi

Sindiran terhadap pemerintah terlihat dari tweet seperti “Pemerintah jangan hanya suka bagi-bagi jabatan” dan “Kabinet gemuk nggak guna.” Kritik diarahkan pada praktik nepotisme, inefisiensi birokrasi, serta lemahnya pemberantasan korupsi seperti pada “Percuma koruptor itu masuk penjara, palingan juga dapat diskon lagi.” Dalam konteks prinsip kesantunan Brown dan Levinson (1987), tweet ini melanggar prinsip kesantunan negatif karena menyerang pihak yang disindir tanpa mitigasi.

Sindiran lainnya seperti “Pengangguran di mana-mana... terlalu bangsat dan munafik di negeri ini,” menggunakan diksi kasar dan metafora ekstrem untuk mengekspresikan ketidakpuasan sosial. Bentuk expressive act (Austin, 1962; Searle, 1969) ini menunjukkan luapan frustrasi terhadap ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural.

Beberapa tweet juga menyuarakan ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah memberantas korupsi. Misalnya, “Omon-omon aja terus kau pemerintah, berantas koruptor aja kagak becus.” Frasa “omon-omon” mengandung makna ejekan terhadap janji kosong yang tidak pernah direalisasikan.

Sindiran terhadap pemerintah ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan, tetapi juga menjadi bentuk kontrol sosial oleh masyarakat. Dalam kajian van Dijk (1998), ujaran semacam ini dapat dianalisis sebagai bagian dari strategi wacana oposisi terhadap dominasi ideologis penguasa.

Sindiran dalam bentuk ini juga menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Melalui pilihan kata yang sengaja tajam, netizen mengekspresikan resistensi terhadap struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.

c. Sindiran terhadap Figur Presiden dan Wakil Presiden

Beberapa tweet secara langsung menyasar presiden dan wakil presiden. Misalnya, “Astaghfirullah, akibat debat nangis-nangis, terus kalian fomo milih dia. Inilah hasilnya,” mengandung sarkasme dan ekspresi kekecewaan. Kritik lebih tajam tampak dalam “Setelah melihat video ini saya percaya kalau ijazah Jokowi itu asli, Asli diedit,” yang mengandung ironi dan mencerminkan krisis kepercayaan publik.

Sindiran terhadap wapres seperti “cara mendapatkan wapres ga bener, terlalu dipaksakan, semua diubah termasuk undang-undang” mengkritik manipulasi politik dan perubahan hukum demi kepentingan kekuasaan. Penggunaan metafora religius dan temporal seperti “anak kemarin sore” dan “tidak halal” menunjukkan degradasi legitimasi politik.

Tweet lainnya memperlihatkan hilangnya kredibilitas pemimpin di mata publik. Misalnya, “belajarlh sampe tua biar ga disamain sama jokowi,” memperlihatkan ironi yang menempatkan presiden sebagai contoh yang tidak patut ditiru. Kritik ini bersifat personal namun sekaligus mencerminkan kekecewaan sistemik.

Kritik terhadap figur pemimpin juga menjadi bentuk resistensi terhadap kultus individu yang sering muncul dalam sistem politik populis. Dalam konteks ini, sindiran digunakan untuk meruntuhkan narasi dominan yang dibangun oleh rezim penguasa.

Sindiran ini juga menandakan bahwa media sosial telah menjadi ruang untuk mendekonstruksi wibawa politik tradisional. Kritik terhadap pemimpin dilakukan secara terbuka, bahkan dengan humor yang sarkastik, sebagai bagian dari praktik demokrasi digital.

d. Strategi Linguistik dalam Sindiran Politik

Tweet-tweet menggunakan berbagai strategi retorik, seperti pertanyaan retorik “Apakah keluhan kita didengar pemerintah? Atau mereka tutup mata tutup kuping?” yang tidak meminta jawaban literal, tetapi menyampaikan kritik secara implisit. Kalimat seperti “makan bergizi gratis (X), makan beracun gratis (√)” menggunakan metafora sinis yang memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.

Tweet-tweet juga memuat sinisme terhadap data resmi, seperti dalam “Katanya 78% masyarakat puas kinerja presiden dan wapresnya, bersyukur ada fakta dari tombol dislike.” Kalimat ini memanfaatkan pelanggaran maksim kualitas untuk menyiratkan dugaan manipulasi informasi publik.

Strategi lain seperti ironi, hiperbola, dan metafora digunakan secara konsisten untuk menyampaikan ketegangan antara harapan rakyat dan kenyataan yang mereka hadapi. Strategi ini memperkuat daya kritis sindiran dan meningkatkan daya tarik retoriknya.

Pemilihan diksi juga penting, di mana netizen menggunakan bahasa informal, kasar, atau bahkan humor gelap untuk memperkuat pesan. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan berbahasa di media sosial, meskipun dalam batas-batas etika publik. Strategi kebahasaan tersebut menunjukkan bagaimana sindiran dipakai tidak hanya sebagai alat ekspresif, tetapi juga sebagai alat persuasif yang mampu mempengaruhi opini publik.

e. Media Sosial sebagai Arena Politik dan Ideologi

Twitter sebagai ruang digital telah menjadi arena wacana politik yang horizontal, partisipatif, dan demokratis (Castells, 2012). Hashtag seperti #Jokowi, #wapres, dan #politik berfungsi sebagai alat pragmatik untuk memperluas jangkauan pesan dan menciptakan afiliasi diskursif (Zappavigna, 2012).

Fenomena sindiran memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam diskursus politik. Tweet seperti “belajarlh sampe tua biar ga disamain sama jokowi” menunjukkan bahwa kritik politik tidak lagi terbatas pada elite intelektual, tetapi juga dilakukan oleh warga biasa dengan cara populer dan efektif.

Dalam konteks ini, sindiran di media sosial dapat dipahami sebagai praktik ideologis yang membentuk identitas kolektif netizen. Sindiran tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga memperkuat solidaritas terhadap nilai atau sikap politik tertentu.

Selain itu, media sosial memungkinkan penyebaran sindiran secara masif dan cepat, menciptakan efek viral yang memperluas pengaruh wacana kritis terhadap penguasa. Hal ini menciptakan dinamika politik baru yang lebih cair dan terbuka. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran dari politik formal ke politik afektif, di mana emosi seperti marah, kecewa, dan cemas diartikulasikan melalui bentuk-bentuk bahasa sindiran yang mudah dipahami dan dibagikan.

f. Implikasi Sosial-Politik Sindiran Digital

Sindiran politik mencerminkan perasaan tidak berdaya masyarakat terhadap struktur kekuasaan. Tweet seperti "Omon-omon aja terus kau pemerintah, berantas koruptor aja kagak becus" memperlihatkan pola frustrasi yang berulang. Bahasa sindiran menjadi bentuk resistensi terhadap status quo dan kontrol sosial atas kebijakan publik.

Sindiran dalam bentuk visual dan meme (meskipun tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini) juga memperkuat makna dan daya sebar ujaran. Multimodalitas menjadi bagian dari evolusi komunikasi politik yang semakin kompleks.

Sindiran juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kritik sosial dalam sistem demokrasi. Dengan bahasa yang tidak langsung namun tajam, masyarakat menyampaikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan dan kualitas kepemimpinan nasional. Selain itu, bahasa sindiran dapat memunculkan diskursus tandingan terhadap narasi resmi yang dibangun oleh negara. Dalam konteks ini, netizen tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen makna politik yang aktif.

Oleh sebab itu, Penting bagi peneliti bahasa untuk terus mengikuti perkembangan dinamika bahasa sindiran di ruang digital ini. Selain sebagai objek kajian linguistik, sindiran politik di media sosial juga menawarkan gambaran tentang kesehatan demokrasi suatu bangsa. Dengan memahami ragam dan strategi kebahasaan yang digunakan, kita bisa melihat bagaimana bahasa bekerja sebagai alat kontrol sosial, resistensi, bahkan revolusi kultural.

Akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa bahasa sindiran di Twitter bukan hanya alat untuk menyampaikan ketidakpuasan, tetapi juga membentuk identitas sosial dan politik penggunanya. Netizen menjadikan sindiran sebagai bentuk literasi kritis terhadap wacana-wacana kekuasaan. Dalam konteks ini, studi pragmatik terhadap tweet politik populer tidak hanya mengungkap makna tersembunyi di balik ujaran, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial-politik masyarakat digital Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa bahasa sindiran di Twitter (X) merupakan ekspresi pragmatik yang kompleks dan strategis dalam menyampaikan kritik terhadap isu sosial-politik. Melalui analisis terhadap tweet bertagor politik seperti Jokowi, wapres, pemerintah, dan program makan bergizi gratis, ditemukan bahwa sindiran digunakan dengan ironi, sarkasme, hiperbola, dan retorika kritis untuk menyampaikan ketidakpuasan secara implisit namun tegas. Mayoritas sindiran ini

melanggar maksim kerja sama Grice, terutama maksim kualitas dan relevansi, yang justru memperkuat efek komunikatifnya. Sindiran menjadi sarana ekspresif bagi netizen untuk menyuarakan kritik secara tajam, kreatif, dan emosional, tanpa harus menyebutkan objek secara langsung.

Twitter (X) tidak hanya sekadar platform berbagi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat membentuk opini publik, menciptakan narasi alternatif, dan mengekspresikan identitas politik. Penggunaan tagar, humor politis, dan pertanyaan retorik mencerminkan keterlibatan emosional dan intelektual pengguna terhadap isu ketimpangan sosial, korupsi, dan krisis kepemimpinan. Bahasa sindiran di media sosial menunjukkan adanya literasi kritis dan partisipasi politik yang aktif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kajian linguistik digital untuk memahami dinamika kebahasaan dalam konteks politik dan teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford: Oxford University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics* (Vol. 3, pp. 41–58). Academic Press.
- Leech, G. (1983). *Principles of pragmatics*. Longman.
- Maghfiroh, I., & Rahmiati, R. (2024). Kesantunan berbahasa dalam media sosial: Kajian pragmatik terhadap komentar online. *Jurnal Nakula*, 2(6), 340–349. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i6.1374>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Pratama, R. P. (2024). Twitter (X), bahasa dan pertarungan wacana. Retrieved from [https://rakaputrapr.medium.com/Twitter-\(X\)-bahasa-dan-pertarungan-wacana-8ffaff29eaf2](https://rakaputrapr.medium.com/Twitter-(X)-bahasa-dan-pertarungan-wacana-8ffaff29eaf2)
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- van Dijk, T. A. (1998). *Ideology: A multidisciplinary approach*. Sage Publications.
- Wodak, R. (2001). *The discourse of politics in action: Politics as usual*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zappavigna, M. (2012). *Discourse of Twitter (X) and social media: How we use language to create affiliation on the web*. London: Continuum.